

**PROSIDING WORKSHOP 2012**

# **MENGAJAR DAN MENELITI ASIA TENGGARA**



**PSSAT**

Pusat Studi Sosial Asia Tenggara  
Universitas Gadjah Mada

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar — v

Daftar Isi — vii

**Budidaya Kopi di Hutan Jawa: Relevansi Lokal dalam Konstelasi Global**

Siti Zurinani, Universitas Brawijaya — 1

**Citra Ruang Imajener sebagai *Genius Loci* Kesakralan Arsitektur Tradisional untuk Mengurangi Eksploitasi Revitalisasi Aset Pariwisata. Studi Kasus: *nDalem Pangeranan* Kraton Kasunanan di Kampung Baluwarti, Surakarta**

Dyah. S Pradnya, Universitas Sebelas Maret — 25

**Daya tarik Investasi di Wilayah Perbatasan Indonesia – Singapura**

Ade Priangani, Universitas Pasundan — 51

**Di bawah Lindungan Negara (?); Mimpi Baru *Koeli* Asia Tenggara**

Moordiati, Universitas Airlangga — 77

**Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas Berbasis Agama di Asia Tenggara**

Padma Indranila, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara — 95

**Gerakan Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Politik Perseteruan**

Dwi Setyowati, Universitas Gadjah Mada — 105

**Konsep Dewa Raja dalam Negara Tradisional Asia Tenggara**  
Sudrajat, Universitas Negeri Yogyakarta — 137

**Konsumsi dan Gaya Hidup: Interseksi Kelas dan Urbanisme Kontemporer di Asia Tenggara**

Linggar Rama Dian Putera, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara — 157

**Memproyeksikan Norma Intramural ASEAN ke Area Extramural: Keberhasilan TAC Di Laut Cina Selatan?**

Ratih Indraswati, Universitas Katolik Parahyangan — 195

**Migrasi dan Tantangan *Human Trafficking* di Asia Tenggara**

Ignatius Ismanto, Universitas Pelita Harapan — 221

**Pergulatan Identitas dan Regionalisme Asia Tenggara**

Nuraeni, Universitas Padjajaran — 247

**“Tatmadaw” dan Demokrasi di Myanmar**

V.L. Sinta Herindrasti, Universitas Kristen Indonesia — 267

Biografi Penulis — 305

## “TATMADAW” DAN DEMOKRASI DI MYANMAR

V.L. Sinta Herindrasti, Universitas Kristen Indonesia

### Abstrak

Peranan “Tatmadaw”, kelompok militer Myanmar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah Burma/Myanmar. Keberadaannya “at the heart of power” telah menjadi “pilar sentral” kehidupan sosial dan politik Myanmar sejak masa kemerdekaan dari Inggris. Desakan reformasi dan demokratisasi dari kelompok non-militer dan berbagai sektor masyarakat baik nasional, regional maupun internasional telah mendorong kelompok militer Myanmar menyesuaikan diri dengan mengambil peran sedemikian rupa seperti yang diharapkan dalam suatu sistem politik demokratis. Aspek historis, ideologis, politis, ekonomis dan institusional akan menjadi “faktor penentu” sejauh mana militer akan “menyerah” terhadap tuntutan penuh demokratisasi Myanmar, yaitu dengan mundur dari pemerintahan dan menyerahkan kepemimpinan politik nasional sepenuhnya kepada kelompok sipil.

Kata kunci: peran militer, Tatmadaw, reformasi, demokrasi

### Pengantar

Berbagai perubahan sosial dan politik yang berlangsung di Myanmar akhir-akhir ini oleh sebagian besar masyarakat internasional dianggap sebagai tanda-tanda transformasi ke arah “demokratisasi”<sup>1</sup> dan menjadi

1 Demokratisasi menunjuk pada proses transisi menjadi rejim politik yang lebih demokratis. Bisa merupakan transisi dari rejim otoritarian menjadi semi demokrasi atau demokrasi penuh. Atau dari sistem politik semi otoritarian menjadi demokrasi penuh. Pola demokratisasi yang berbeda ditemukan dalam berbagai fenomena politik. Demokratisasi diyakini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang masih menjadi bahan perdebatan, apakah sejarah,



perhatian utama para pengamat politik Myanmar, mengingat Burma/ Myanmar<sup>2</sup> selama hampir 50 tahun (1962 – 2012) adalah negara tertutup dan terisolasi dari dunia luar. Tanda-tanda tersebut terlihat antara lain dengan diselenggarakannya pemilihan sela (*by election*) pada 1 April 2012 yang memperebutkan 45 kursi dan dimenangkan oleh partai oposisi NLD (*the National League for Democracy*) pimpinan Aung San Su Kyi, dibebaskannya para tawanan politik yang disusul dengan pelantikan Aung San Su Kyi sebagai anggota parlemen serta diberikannya hak kebebasan penuh untuk melakukan lawatan ke luar negeri.

Ketertutupan atau isolasi ini tidak dapat dilepaskan dari *peran militer* dan *kebijakan politik* rejim militer Myanmar yang selama puluhan tahun telah berkuasa dan memegang peran sentral dalam sistem politik Myanmar; dengan segala implikasi dan catatan “hitam” dari segi kemajuan bagi kesejahteraan rakyat, praktek kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, kebebasan sipil dan sebagainya. Sejauh mana “demokratisasi” akan berkembang di Myanmar? Mungkinkah meskipun pemerintah sekarang mencanangkan kebijakan “Road Map to Democracy” – suatu kebijakan yang seratus delapan puluh derajat bertentangan dengan “The Burmese Way to Socialism” – suatu demokrasi penuh akan diberikan kepada rakyat? Dalam kaitannya dengan dominasi peran

---

budaya, ekonomi, kelas menengah, masyarakat sipil, tekanan asing, dll. Lihat al. <http://en.wikipedia.org/wiki/Democratization>. Konsep demokratisasi mencakup seperangkat norma-norma demokratis, kelembagaan dan praktek-prakteknya sementara demokratisasi antara lain diformulasikan sebagai proses institusionalisasi kekuasaan/kekuatan rakyat. Lebih jauh Christian Welzel, *Theories of Democratization*, diakses dari [http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder\\_published/publication\\_579/files/OUP\\_Ch06.pdf](http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/publication_579/files/OUP_Ch06.pdf)

- 2 Di bawah kolonial Inggris Myanmar dan ibukotanya Yangon disebut Burma dan Rangoon. Namun sejak 1991 pemerintah Burma merubahnya menjadi Myanmar dengan beberapa alasan yang dapat disimpulkan dari pendapat U Swan Lwin, Direktur Jenderal Kementerian Komisi Bahasa Myanmar. Myanmar merupakan nama asli dan menjadi pemersatu berbagai bahasa yang berbeda. Juga memberi perasaan kebebasan dari kolonialisme Inggris dan membangkitkan rasa persatuan di bawah nama “The Union of Myanmar”, lih. Michael S. Dobbs-Higginson, “Myanmar (Burma) Previously a Tragic Exercise in Futility – Real Change is Now Underway”, dalam *Asia Pacific: Its Role in the New World Disorder*. Victoria: Mandarin, 1996. Hal 375.

militer, demokratisasi berarti semakin berkurang dan menghilangnya peran militer secara langsung dan tidak langsung dalam pemerintahan.<sup>3</sup> Dengan kata lain, sejauh mana militer akan "*give in*" (menyerahkan, terpaksa mengalah) terhadap tuntutan demokratisasi masyarakat lokal, nasional, bahkan regional maupun internasional? Sesuatu yang tidak mudah terjadi bahkan di negara dengan "keterbukaan" yang cukup tinggi seperti pengalaman rejim militer di Indonesia atau negara-negara Amerika Latin.

Tulisan ini akan mengkaji peran rejim militer Myanmar dari waktu ke waktu terutama sejak kemerdekaan Burma dan melihat kemungkinan dan peluang yang diberikan dan terbuka bagi proses demokratisasi yang lebih besar di Myanmar. Keterbatasan waktu dan ketersediaan data yang dapat diakses barangkali belum akan memberikan jawaban memuaskan berbagai pertanyaan di atas, namun kami berharap usaha ini dapat dijadikan awal untuk menggali "*the way of thinking*" dan "*further actions*" ke arah demokratisasi dari pemerintah Myanmar yang ada sekarang.

### Siapakah *Tatmadaw* ?

*Tatmadaw* (baca: *tap ma taw*) adalah nama resmi organisasi militer di Myanmar. Angkatan bersenjata ini ada di bawah Kementerian Pertahanan dan terdiri dari Angkatan Darat (*Tatmadaw Kyee*), Angkatan Laut (*Tatmadaw Yay*) dan Angkatan Udara (*Tatmadaw Lei*) sementara pasukan atau kekuatan pembantu (*auxiliary forces*) adalah Kepolisian Myanmar (*Myanmar Ye tat Hpwe*), Unit Milisi Rakyat dan Kekuatan Perbatasan (*Na Sa Kha*).

3 Lihat lebih jauh S.E. Finer, *Comparative Government*, England: Penguin Books, 1982. Hal. 548. Dalam penelitiannya mengenai berbagai bentuk pemerintahan modern, Finer membedakan antara pemerintahan liberal-demokratik, totalitarian dan pemerintahan di negara dunia ketiga. Rejim Militer masih sering diketemukan dalam sistem politik di negara sedang berkembang dalam berbagai bentuk dan karakternya.

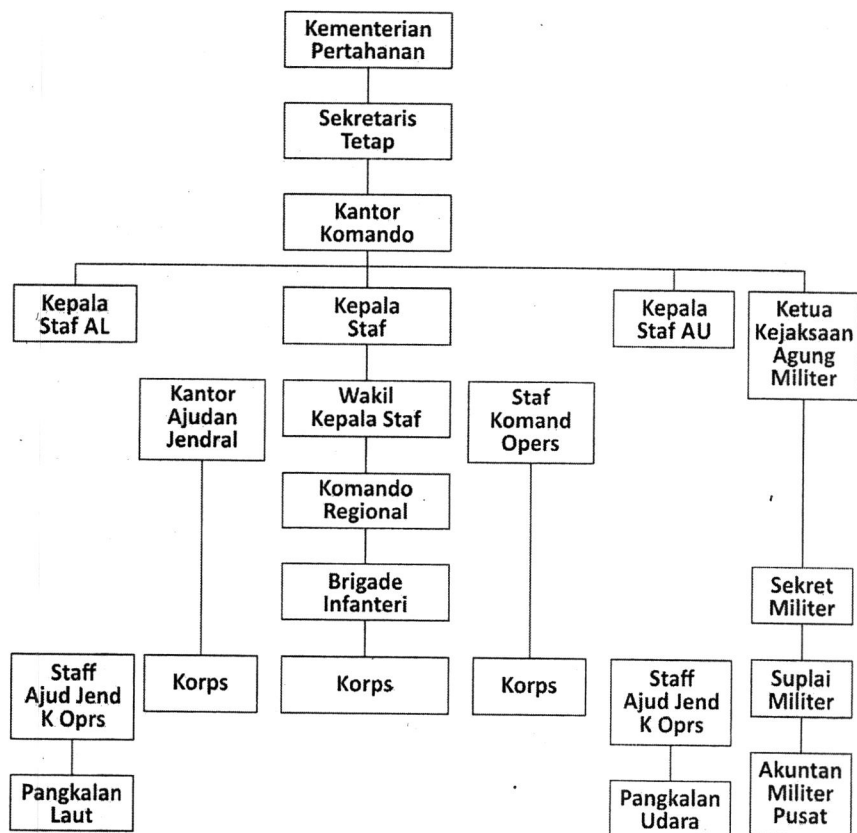
Pada masa kemerdekaan 1948, *Tatmadaw* merupakan kesatuan yang lemah, kecil dan tidak bersatu. Perpecahan *Tatmadaw* mengikuti garis latar belakang etnik, afiliasi politik dan kesatuan yang berlainan dan yang termasuk menjadi salah satu masalah serius adalah ketegangan antara para perwira Karen yang berasal dari the *British Burma Army* dan para perwira Bamar yang berasal dari the *Patriotic Burmese Forces (PFB)*. Sesuai dengan persetujuan yang dicapai dalam Konperensi *Kandy* pada September 1945 *Tatmadaw* mengalami reorganisasi dengan menyatukan The *British Burma Army* dan the *Patriotic Burmese Force* dimana korps perwira dibentuk dan diambil dari kedua belah pihak. Dinyatakan juga Inggris sempat membentuk apa yang disebut "Class Battallions" berdasarkan etnisitas.

Struktur Komando Angkatan Bersenjata Myanmar<sup>4</sup> sejak 1948 kurang lebih adalah sebagai berikut:

---

4 <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mm-waroffice.jpg>

## Struktur Komando Angkatan Bersenjata Myanmar 1948



Dengan susunan posisi Komandan dan Staf dalam Kantor Komando berdasarkan etnisitas sebagai berikut <sup>5</sup>:



### Posisi Komandan dan Staff dalam Kantor Komando (War Office) 1948

Jabatan	Nama dan Pangkat	Etnik
Kepala Staf	LetJen Smith Dun	Karen
Kepala Staf Angkatan Darat	BrigJen Saw Kyar Doe	Karen
Kepala Staf Angkatan Udara	LetKol Saw Shi Sho	Karen
Kepala Staf Angkatan Laut	Komandan Khin Maung Bo	Bamar
Komandan Wilayah Birma Utara	<b>BrigJen Ne Win</b>	Bamar
Komandan Wilayah Birma Selatan	BrigJen Aung Thin	Bamar
Divisi Infanteri Pertama	BrigJen Saw Chit Khin	Karen
Ajudan Jenderal	LetKol Kyaw Win	Bamar
Staf Komando Operasional	LetKol Saw Donny	Karen

Sejak itu *Tatmadaw* masih mengalami reorganisasi sekali lagi pada 1 Januari 1956 yaitu *War Office* diganti namanya menjadi Kementerian Pertahanan (*Ministry of Defense*) dimana Jenderal Ne Win diangkat menjadi Kepala Staf untuk mengepalai tiga (3) unit angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut dan Udara yang untuk pertamakali berada dalam satu komando. Sementara Brigadir Jenderal *Aung Gyi* memegang wakil Kepala Staf (Angkatan Darat), Brigadir Jenderal *D. Blake* menjadi Komandan Wilayah Burma Selatan (SBSD-South Burma Sub District Command) dan Brigadir Jenderal *Kyaw Zawa*, anggota Thirty Comrades, menjadi Komandan Wilayah Burma Utara (NBSD-North Burma Sub District Command).

### Peran *Tatmadaw* dalam Sistem Politik Myanmar

Menurut S.E. Finer<sup>6</sup> dalam sistem politik yang belum mapan kelompok militer seringkali mengambil peran dalam pemerintahan.

6 Finer, op cit., hal 548-549

Secara umum terdapat tiga bentuk peran yang biasa diambil, yaitu (i) *peran programatik*, di sini militer mengambil alih kekuasaan dengan tujuan untuk melaksanakan program yang positif. Peran programatik termasuk jarang yang lebih sering adalah peran (ii) *transisional* yang sering dikonotasikan negatif karena dilakukan dengan cara supresif atau transaksional, yaitu militer berkuasa atau mengklaim berkuasa sebagai persiapan untuk pembentukan konstitusi baru atau aliansi politik baru. Peran yang ketiga (iii) adalah *murni personal*, dimana junta atau pemimpin militer mengambil alih kekuasaan karena ambisi pribadi, sesuatu yang tidak mudah dibuktikan karena biasanya pemimpin militer tidak akan mengakui hal itu secara terbuka dan akan memberikan alasan dengan motif yang lebih patriotik.

Suatu kelompok militer yang berkuasa atau disebut rejim militer sering diartikan sebagai *...a state of affairs where a group of military leaders take over the functions of government in the name of the armed forces and then rule coercively through their support without a popular mandate ...*<sup>7</sup>. Dengan kriteria ini menurut Finer tidak begitu banyak rejim di dunia yang dapat dimasukkan, akan tetapi untuk menggolongkan suatu rejim adalah militer atau bagian dari militer dapat diajukan pertanyaan kunci yang lain: *...whether the military leadership of the day is in practice the supreme, or at last the pre-eminent, source of decision making...*<sup>8</sup>. Meskipun sering sulit dijawab dan dibuktikan karena keterbatasan informasi, akan tetapi pada prinsipnya pertanyaan ini bisa dijawab. Karakter lain yang dikemukakan Finer adalah tipe rejim militer yaitu (i) pemerintahan militer langsung (*direct*) yang terbagi dua yaitu *langsung (direct)* dan *langsung kuasi sipil (quasi-civilianized)*; (ii) Pemerintahan militer tidak langsung (*indirect*) yang juga terbagi dua, yaitu pengaruh militer di belakang layar yang mempengaruhi seluruh kegiatan politik atau yang lebih terbatas (*intermittent*), misalnya simpel veto.

7 Finer, op.cit hal 551

8 Finer, op. cit hal 552

Dengan latar belakang pemahaman singkat di atas, setidaknya terdapat tiga aksi besar intervensi militer Burma yang menentukan Myanmar dalam bentuknya hingga sekarang, yaitu

1. Pengalihan dari pemerintahan Demokrasi Parlementer (1948 – 1962) pimpinan PM U Nu menjadi “Pemerintahan Caretaker” (1959-1960) oleh Jenderal Ne Win;
2. Kudeta Militer 1962 oleh Jenderal Ne Win dari pemerintahan PM U Nu disusul dengan pembentukan “Dewan Revolusioner Militer” (*Revolutionary Government*) yang berlangsung selama periode 1962-1974. Sedangkan periode 1974-1988 ditandai dengan Sosialisme Burma dimana Burma berada di bawah pemerintahan militer sistem satu partai melalui BSPP-Burma Socialist Programme Party;
3. Pemerintahan Militer SLORC (State Law and Order Restoration Council)/SPDC (State Peace and Development Council) dari 1988 – 2005;
4. Pemilihan Umum 7 Nopember 2010 sebagai langkah ke lima rangkaian “Road Map to Democracy” yang diadakan oleh SPDC dan dimenangkan oleh partai militer USDP (The Union Solidarity and Development Party) dan Thein Sein pimpinan USDP menjadi Presiden Myanmar hingga sekarang.

### **Dari Demokrasi Parlementer Menuju Pemerintahan Caretaker (1948-1959)**

Sejak awal kemerdekaan pada 4 Januari 1948, Burma sempat mengalami periode demokrasi parlementer yaitu dari Januari 1948 – Oktober 1958.<sup>9</sup> Konstitusi 24 September 1947 berlaku efektif dan

9 Studi demokrasi Burma/Myanmar oleh Franziska Blum, Friederike Trotter, Hans-Bernd Zollner (ed) dari Universitas Pasau Jerman membagi periodisasi Myanmar dalam 5

Majelis Pemilih (Constituent Assembly) yang terpilih pada April 1947 menjadi parlemen hingga pemilihan pertama di bawah konstitusi baru. AFPFL (Anti-Fascist People's Freedom League) yang didirikan pada 1944 sebagai AFO (the Anti Fascist Organisation) oleh CPB (the Communist Party of Burma) pimpinan Thakin Soe, BNA (the Burma National Army) pimpinan Aung San dan PRP (the People's Revolutionary Party) pimpinan U Nu – menjadi anggota parlemen yang dominan. Sebagai aliansi dari berbagai organisasi dan faksi, seperti the Socialist Party, Trade Union Congress (TUC) dan All Burma Peasant Organization (ABPO). AFPFL pimpinan U Nu harus dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam hubungan internal partai.

Konteks nasional yang perlu dicatat dan berpengaruh terhadap proses demokratisasi dalam periode ini adalah "*perang sipil*" terhadap gerakan Karen dan kelompok komunis.<sup>10</sup> Suatu alasan yang nantinya menjadi dasar tindakan (intervensi) militer dalam berbagai episode sejarah perkembangan sistem politik Myanmar.

Selama periode Demokrasi Parleментар pemilihan umum berhasil dilaksanakan sesuai dengan Bab 233 Konstitusi 1947<sup>11</sup> yaitu

---

periode, yaitu Periode Kolonial (hingga 1948), Periode Parleментар (1948-1958), Periode Transisi (1948-1962), Periode Sosialis (1962-1988), Pemberontakan (Maret-September 1988), Periode Antagonisme (19 September 1988-Sek). Lih lebih jauh *In their Own Voice "Democracy" as Perceived in Burma/Myanmar 1921-2010*. Working Paper No 14. Germany: Universitas Passau, 2010 .

10 Gerakan perlawanan Karen/KNU (Karen National Union) terhadap pemerintah Burma telah berlangsung sejak era feudalisme Burma, kolonialisme Inggris dan Fasisme Jepang. Karen memperjuangkan kemerdekaan karena menganggap sebagai suku paling awal datang di tanah Burma dan sepanjang sejarah merasa ditindas oleh pemerintah Burma. Sistem federal yang ditolak pemerintah mendorong pemberontakan suku yang lain termasuk kelompok komunis (Kuomintang) yang berbasis di Burma Timur. Lih *A Karen History* dalam <http://www.rainbowends.org/karen/history.htm>

11 Lih The Constitution of The Union of Burma 1947. <http://www.blc-urma.org/html/Constitution/1947.html>



selama beberapa bulan antara Juni 1951 hingga April 1952. AFPFL memenangkan 60% suara atau 147 dari 250 kursi dan merupakan pemilihan umum dengan partisipasi terendah (1,5 juta suara dari 8 juta suara) dalam sejarah pemilihan umum Burma sejak 1920.

Timbulnya perpecahan dalam AFPFL, menguatnya pemberontakan komunis serta krisis politik yang mengiringinya, mengakibatkan terjadinya peralihan kekuasaan kepada Ne Win pada 26 September 1958. Disebutkan PM U Nu<sup>12</sup> ‘mengundang’ Kepala Staf Ne Win untuk mengambil alih kepemimpinan dalam kapasitas sebagai “pemerintahan Caretaker”<sup>13</sup>. Sebelumnya pada 21 Oktober 1958 Departemen Pertahanan Nasional telah menulis dokumen dengan judul “*The National Ideology and Our Pledge – First Phase of the Ideological Development*” yang intinya adalah bagaimana mengamankan dan membangun negara, dengan kata kunci “Freedom – first, Democracy – second, Socialism – third.”<sup>14</sup> Pemerintahan Caretaker diberi mandat untuk memulihkan stabilitas dan menanamkan demokrasi yang dianggap sebagai prasyarat untuk membangun ekonomi sosialis, yaitu suatu ekonomi terencana yang berarti untuk pengembangan produksi beberapa cabang industri dan perusahaan harus dinasionalisasi.

Pemerintahan Caretaker berhasil melaksanakan pemilihan anggota parlemen pada Februari 1960 sekaligus melakukan ‘pembersihan’ perwira militer yang terbukti terlibat mendukung berbagai partai politik selama periode 1961-1962, yaitu BrigJen Aung Shwe (Komandan Wilayah Burma Selatan), BrigJen Mau Mau (Direktorat Pelatihan

12 PM U Nu berkuasa selama beberapa periode yaitu 4 Januari 1948-12 Juni 1956, 28 Februari 1957-28 Oktober 1958, 4 April 1960-2 Maret 1962 lih. [http://en.wikipedia.org/wiki/U\\_Nu](http://en.wikipedia.org/wiki/U_Nu)

13 Caretaker government is a type of government that rules temporarily. It is often set up following a war until stable democratic rule can be restored, or installed, in which case it is often referred to as a provisional government. Selanjutnya lih [http://en.wikipedia.org/wiki/Caretaker\\_government](http://en.wikipedia.org/wiki/Caretaker_government)

14 Franziska Blum, Friederike Trotter, Hans-Bernd Zollner (ed). Op. cit. hal 48

Militer), Kolonel Aye Mung (Brigade Infantri No 2), Kolonel Tin Maung (Brigade Infantri No 12), Kolonel Hla Maw (Brigade Infantri No 5), Kolonel Kyi Win (Brigade Infantri No 7), Kolonel Thein Tote (Brigade Infantri No 4), LetKol Kyaw Myint dan LetKol Chit Khaing (Sekolah Kekuatan Tempur).<sup>15</sup>

## Sosialisme Burma (1962-1988)

Burma memasuki era Sosialisme atau "The Burmese Way to Socialism" adalah ketika kurang dari 2 tahun sesudah kemenangannya, U Nu digulingkan melalui kudeta oleh Ne Win pada 2 Maret 1962 yang kemudian membentuk suatu Dewan Revolusioner (the Revolutionary Council). Susunan Dewan Revolusioner seluruhnya adalah anggota militer seperti yang dinyatakan U Nu ketika mengumumkan kudeta melalui radio, *"...I have to inform you, citizens of the Union that Armed Forces have taken over the responsibility and the task of keeping the country's safety, owing to the greatly deteriorating conditions of the Union"*.<sup>16</sup> dan yang ternyata akan berkuasa selama 12 tahun ke depan. Setidaknya dua alasan dinyatakan dalam tindakan kudeta ini menurut Mya Thien, yaitu *...that Union of Myanmar was in danger of disintegrating; and that the political regime of the civilian government of U Nu has strayed away from the socialist path laid down by the nation's founder, General Aung San...*<sup>17</sup>

Hanya beberapa hari setelah kudeta, Ne Win meminta Chit Hlaing, seorang pengajar Marxisme dan Komunisme Uni Soviet di Kementerian Pertahanan untuk menulis kebijakan (policy) Dewan Revolusioner yaitu *"The Burmese Way to Socialism: Policy Declaration*

<sup>15</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/tatmadaw>

<sup>16</sup> Cuplikan dari Dr. Maung Maung, General Ne Win and Burma dalam <http://en.wikipedia.org/wiki/tatmadaw>. Dewan Revolusioner terdiri dari Ketua Jendral Ne Win dengan 21 anggota yang berkuasa dalam kurun waktu 1962-1974.

<sup>17</sup> Lihat lebih jauh Myat Thein, *Economic Development of Myanmar*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 2001. Hal 52.

of the Revolutionary Council” yang diterbitkan pada 30 April 1962 beserta dua dokumen utama lain yaitu *The Constitution of the Burma Socialist Party* (4 Juli 1962) dan *The System of Correlation of Man and His Environment* (17 Januari 1963).

Prinsip sosialisme yang digambarkan dalam deklarasi adalah:

*The avoidance of both “deviation toward right or left (Art. 3), the applicability to the concrete realities and also the natural conditions peculiar to Burma (Art. 2) and the progression of theories in accordance with the times, conditions, environment and the ever changing circumstances” (Art. 4). Related to economy, the socialist policy aims at nationalizing “agriculture and industrial production, distribution, transportation, communications, external trade, etc. (Art. 10) “with the sole aim of giving maximum satisfaction to material, spiritual and cultural needs of the whole nation”(Art. 8).<sup>18</sup>*

Dengan kata lain, tujuan atau arah utama berbagai dokumen tersebut adalah “Burmanisasi”, sistem sosialis dengan perencanaan terpusat dan strategi mandiri yang melihat ke dalam (*inward-looking strategy*).<sup>19</sup> Dasar-dasar transisi ke arah sosialisme dimulai dengan *menasionalisasi* perusahaan-perusahaan milik asing termasuk joint-venture, bank, industri, perdagangan dengan pihak asing, retail, kehutanan, perikanan, pertambangan termasuk rumah sakit dan sekolah. Untuk sektor tertentu seperti pertanian, nasionalisasi tidak dilakukan tetapi kontrol harga dan penanaman harus sesuai dengan rencana dan ketentuan pemerintah termasuk menjual hasil produksi kepada negara dengan harga di bawah harga pasar.

Partai Program Sosialis Burma atau BSPP (the Burma Socialist

18 Franziska Blum, Friederike Trotter, Hans-Bernd Zollner (ed), op. cit. hal 71.

19 Myat Thein, op. cit. hal 52.

Programme Party) menjadi satu-satunya partai yang diijinkan secara legal sejak pemerintah militer 1962 hingga 1988 dengan pemimpin militernya yaitu Ne Win (Juli 1962- Juli 1988), Sein Lwin (Juli-Agustus 1988) dan Dr. Maung Maung (Agustus-September 1988). Eksistensi BSPP diperkuat melalui dekret 1964 yang berjudul "The Law Protecting National Unity" yang menghapus semua partai politik kecuali BSPP dan diformalkan melalui Konstitusi 1974 yang menyatakan bahwa negara menjalankan sistem partai tunggal.

Pada awal 1970-an Burma menjelma menjadi negara yang sangat sosialis (*self reliance isolation*) dengan kontrol dan komando ekonomi di tangan pemerintah. Reformasi parsial sempat dilaksanakan (1974-1988) antara lain berupa tindakan penerimaan pinjaman ODA (Official Development Assistance) dari Jepang, namun hal itu tidak dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi Burma secara keseluruhan.

Dampak kebijakan sosialis bagi ekonomi Burma sangat buruk. Berbagai analisis sosio politik dan ekonomi menunjukkan bahwa sosialisme yang dilakukan oleh rejim militer Burma tidak mampu menciptakan efisiensi dan mengembangkan ekonomi Burma, dan sebagai suatu kebijakan tidak mampu menghasilkan perubahan yang signifikan dan mendasar dalam struktur, kultur dan personalitas masyarakat Burma ke arah modernisasi.<sup>20</sup>

Jalan sosialisme Burma mengakibatkan kemiskinan dan isolasionisme yang tidak tertahankan oleh rakyat dan pada 1988 pemerintah Ne Win harus menghadapi gelombang gerakan pro demokrasi mahasiswa dan rakyat yang dikenal sebagai "8888 Uprising".<sup>21</sup>

20 Mya Maung, *The Burma Road to Poverty: A Socio-Political Analysis*. <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/forwa13&div=27&id=&page=>

21 Gerakan pro demokrasi 8888 (8888 Uprising) yang terjadi pada 8 Agustus 1988 adalah serangkaian protes, demonstrasi yang dimulai oleh mahasiswa di Yangon yang meluas ke seluruh



Gerakan pro demokrasi ini memunculkan kudeta kedua pada 18 September 1988 yang dilakukan oleh Jendral Saw Maung melalui SLORC atau State Law and Order Restoration Council yang menyatakan, "... *In order to bring timely halt to the deteriorating conditions on all sides all over the country and in the interests of the people, the defense forces have assumed all power in the state with effect from today..*". SLORC diklaim dibentuk untuk menciptakan perdamaian dan ketenangan demi menyiapkan pemilihan umum multi partai yang demokratis.<sup>22</sup>

### Peran SPDC dan SLORC (1988 – 2011)

SPDC atau The State Peace and Development Council adalah nama resmi dari rejim militer Burma yang berkuasa pada 1988. Dari 1988-1997 SPDC dikenal sebagai SLORC (State Law and Order Restoration Council) yang mengganti peran BSPP.

Pada saat mulai berkuasa SLORC mengeluarkan Dekrit No 1/1988 menyebutkan bahwa Militer mengambil alih kekuasaan dan mengumumkan dibentuknya SLORC. Melalui Dekrit No 2/1988 SLORC menghapus semua organ Kekuasaan Negara yang dibentuk

---

negara melawan rejim militer. Gerakan berakhir pada 18 September 1988 setelah militer melancarkan represi dan kudeta berdarah oleh SLORC (the State Law and Order restoration Council). Setidaknya ada beberapa sebab munculnya pergerakan massa, yaitu penarikan mata uang tanpa kompensasi, mismanajemen ekonomi, kebijakan sosialisme, kekejaman polisi, korupsi dan kediktatoran militer. Tercatat perkiraan jumlah pendemo yaitu 1 juta di Yangon, 500.000 di Shwedagon Pagoda, 500.000 di kota Yangon, 100.000 di Mandalay, 50.000 di Sittwe dengan jumlah korban 10.000 meninggal, puluhan ribu mengungsi ke Thailand atau bergabung dengan kelompok pembontak. Lih. [http://en.wikipedia.org/wiki/888\\_Uprising](http://en.wikipedia.org/wiki/888_Uprising) dan Bertil Litner, *Outrage: Burma's Struggle for Democracy*. 1989. Hongkong: Review Publishing Company Limited. Hal. 240-256. Atau lihat adegan film *The Lady*, ketika Aung San Suu Kyi kembali ke tanah air dari Inggris untuk menengok ibunya yang sedang sakit di RS, ia menemui banyak mahasiswa/warga sipil terluka ditembak oleh militer dalam gerakan protes 8888. Setelah menjadi Sekjen LND 1988, Suu Kyi ditahan pada 1989 karena dianggap membahayakan negara. *The Lady*. Europacorp. 2012.

- 22 Idem, hal. 176. Tercatat pada akhir 10.000 warga menjadi korban pelaksanaan Martial Law, lih *Burma/Myanmar: How Strong is the Military Regime?* ICG Asia Report No 11, 21 December 2000, Bangkok/Brussels, Hal 3

dibawah Konstitusi Burma 1974, yaitu Legislatif (Pyithu Hluttaw), Kabinet, Yudisial, Kejaksaan termasuk Dewan-dewan kota, daerah, dan desa. SLORC juga menyatakan bahwa Perwakilan Kementerian (Deputy Ministers) juga dihapus. Ketua SLORC pertama adalah **Jenderal Saw Maung** -- seorang jenderal senior dan PM berkuasa dari 18 September 1988 - 23 April 1992 -- yang kemudian digantikan oleh **Jenderal Than Shwe** pada 23 April 1992 sebagai Ketua SLORC dan PM.

Adapun susunan SLORC/SPDC pada 1992, sebagai berikut <sup>23</sup>:

Jenderal Senior	Than Swe	Ketua SPDC Panglima Tertinggi Tatmadaw Kepala Negara Perdana Menteri Menteri Pertahanan
Jenderal	Maung Aye	Wakil Ketua SPDC Panglima Tertinggi Angkatan Darat
Letnan Jenderal	Khin Nyunt	Sekretaris 1 SPDC
Letnan Jenderal	Tin Oo	Sekretaris 2
Letnan Jenderal	Win Myint	Sekretaris 3
Laksamana Muda	Kyi Min	Panglima Tertinggi Angkatan Laut
Brigadir Jenderal	Kyaw Than	Panglima Tertinggi Angkatan Udara

Pada 1989 SLORC sempat mengubah nama resmi negara dari "Socialist Republic of the Union of Burma" menjadi "The Union of Myanmar". Bahkan pada Mei 1990 pemerintah mengadakan pemilihan umum pertama kali sejak pemilihan umum terakhir 30 tahun yang lalu dimana NLD (the National League for Democracy) pimpinan Aung San Suu Kyi memenangkan kursi 392 dari total 489 (hampir 80%). Junta menolak hasil tersebut dan meneruskan pemerintahan hingga 1997 sebagai SPDC hingga penghapusannya pada Maret 2011.

Pada Juni 1997 ASEAN mengakui keanggotaan Myanmar dan

pada 2006 junta yang memindahkan ibukota dari Yangoon ke dekat Pyinmana (2005), secara resmi mengganti nama ibukotanya menjadi Naypyidaw yang berarti “kota para raja”.

### Reformasi Politik 2011 - Sekarang: Peta Jalan Demokrasi Myanmar

Myanmar melaksanakan referendum konstitusi pada 10 Mei 2008 yang menurut junta referendum ini akan menegaskan pelaksanaan peta jalan demokrasi Myanmar atau sering disebut sebagai “*Roadmap to Discipline-flourishing Democracy*” yang kemudian akan diikuti dengan pemilihan multi partai 2010. Beberapa perubahan dalam referendum Konstitusi adalah (i) seperempat kursi parlementer akan diberikan kepada militer, (ii) Kementerian Dalam Negeri akan berada di bawah kontrol militer, (iii) seseorang yang menikah dengan orang asing (*non Burmese*) tidak diijinkan untuk mencalonkan diri menjadi presiden<sup>24</sup>. Pada 15 Mei 2008 Junta mengumumkan bahwa konstitusi disetujui oleh 92,4% suara dan mengklaim 99% hasilnya di 2/3 daerah yang melaksanakan referendum.

Pemilihan umum yang dijanjikan dan berdasarkan Konstitusi referendum berhasil dilaksanakan pada 7 Nopember 2010 diboikot oleh NLD dengan berbagai alasan keberatan.<sup>25</sup> Partai pemerintah USDP (The Union Solidarity and Development Party) memenangkan pemilihan umum dengan hasil lengkap sebagai berikut<sup>26</sup>:

24 [http://en.wikipedia.org/wiki/Burmese\\_constitutional\\_referendum,\\_2008](http://en.wikipedia.org/wiki/Burmese_constitutional_referendum,_2008)

25 NLD menuntut seperangkat persyaratan untuk berpartisipasi dalam pemilu, termasuk perubahan dalam konstitusi untuk mengurangi pengaruh militer, adanya pengawasan internasional dalam pelaksanaan pemilu yang bebas, adil; pembebasan tawan politik termasuk Suu Kyi (sejak 2009 Suu Kyi dijatuhi tahanan rumah selama 3 tahun) termasuk penghapusan artikel 59F mengenai syarat menjadi presiden. Lih [Http://en.wikipedia.org/wiki/Burmese\\_general\\_election,\\_2010](http://en.wikipedia.org/wiki/Burmese_general_election,_2010)

26 Ibid

### Pemilihan Majelis Tinggi (House of Nationalities/Amotya Hluttaw), 2010

Partai	Kursi	Kemenangan/ kekalahan bersih	Kursi %	Suara %	Suara	+/-
USDP	129		57.59			
Penunjukan*	56	+56	25%	-	-	+56
RNDP	7		3.13		263,678	
NUP	5		2.23		4,302,082	
NDF	4		1.79		1,488,543	
CPP	4		1.79		86,211	
ARDP	4		1.79		172,806	
SNDP	3		1.33		496,039	
PSDP	3		1.33		77,825	
CNP	2		0.89		37,450	
Others	7		3.13			
TOTAL	224		100			

\*Catatan: "Penunjukan" (56 kursi) menunjuk pada kursi yang tidak diperebutkan (25% dari total), ditujukan untuk militer (diambil oleh personel Pertahanan) atau disebut Perwakilan Militer (Army Representatives/AR).

### Pemilihan Majelis Rendah (House of representatives/Pyithu Hluttaw), 2010

Partai	Kursi	Kemenangan/ Kekalahan bersih	Kursi %	Suara %	Suara	+/-
USDP	259		58.86	56.76	11,858,125	
Penunjukan*	110	+ 110	25.00	-	-	+110
SNDP	18		4.09	2.44	508,780	
NUP	12		2.73	19.44	4,060,802	
RNDP	9		2.05	2.87	599,008	
NDF	8		1.82	7.10	1,483,329	
ARDP	3		0.68	0.80	167,928	



PNO	3		0.68			
CNP	2		0.45	0.17	36,098	
CPP	2		0.45	0.36	76,463	
PSDP	2		0.45	0.39	82,038	
WDP	2		0.45	0.13	27,546	
Others	10		2.29	9.54	1,992,590	
TOTAL	440		100	100	20,892,707	

\*Catatan: "Penunjukan" (110 kursi) menunjuk pada kursi yang tidak diperebutkan (25% dari total), ditujukan untuk militer (diambil oleh personel Pertahanan) atau disebut Perwakilan Militer (Army Representatives/AR).

Peta jalan Demokrasi itu sendiri telah diumumkan oleh Jenderal Khin Nyunt pada 30 Agustus 2003, yang meliputi proses 7 langkah dalam memulihkan demokrasi di Myanmar. Tujuh langkah tersebut diterjemahkan sebagai berikut <sup>27</sup>:

1. Reconvening of the National Convention that has been adjourned since 1996
2. After the successful holding of the National Covention, step by step implementation of the process necessary for the emergence of a genuine and disciplined democratic system
- 3.. Drafting a new constitution in accordance with basic principles and detailed basic principles laid down by the National Convention
4. Adoption of the constitution through national referendum
5. Holding of free and fair elections for Pyithu Hluttaws (Legislative Bodies) according to the new constituion
6. Convening of Hluttaws attended by Hluttaws members in accordance with the new constitution

27 [http://en.wikipedia.org/wiki/Roadmap\\_to\\_democracy](http://en.wikipedia.org/wiki/Roadmap_to_democracy)

7. Building a modern, developed and democratic nation by the state leaders elected by the Hluttaw, and the government and other central organs formed by the Hluttaw.

Pada 1 April 2012 Pemerintah Myanmar menyelenggarakan pemilihan umum sela (by election) dimana NLD turut berpartisipasi dan memenangkan 43 kursi dari 45 kursi yang diperebutkan oleh 168 kandidat dari 17 partai.

Pada 7 April 2012 Presiden Thein Sein melaksanakan usaha perdamaian dengan kelompok etnis Karen yang diwakili oleh Persatuan Nasional Karen (KNU-Karen National Union) serta sayap militernya di Naypyidaw termasuk penandatanganan gencatan senjata, sejak 1949 berkonflik dengan pemerintah. Hasil yang diharapkan adalah disetujuinya perjanjian perdamaian 13 pasal juga bersama dengan kelompok etnis yang lain.

Pada 2 Mei 2012 Aung San Suu Kyi beserta 42 anggota NLD akhirnya memutuskan untuk bersedia mengambil sumpah sebagai anggota baru parlemen Myanmar setelah berkompromi mengenai masalah penggunaan sejumlah kata dalam sumpah jabatan tersebut demi kepentingan yang lebih besar yaitu keinginan rakyat supaya NLD duduk di parlemen dan menjalankan peran secara aktif dan konstruktif.

### Quo Vadis Demokratisasi Myanmar?

Berbagai langkah reformasi menuju apa yang disebut "demokratisasi" Myanmar khususnya sejak dicanangkannya Peta Jalan Demokratisasi Myanmar pada 2003 boleh dikata tidak lepas dari *peran kelompok militer* (junta militer). Mengapa kelompok militer bisa sangat dominan dan

memainkan peran utama dalam kehidupan sosial dan politik Myanmar? Usaha untuk memahami “karakter” militer Burma/Myanmar barangkali dapat membantu untuk menjawab sejauh mana militer akan “*give in*” terhadap tuntutan demokratisasi masyarakat Myanmar.

Ada beberapa faktor yang patut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang melekat dalam diri militer Myanmar, yaitu: *pertama*, *Tatmadaw* telah berakar dalam budaya dan sejarah Myanmar dan menjadi “pilar sentral” sejak era revolusi kemerdekaan (1947), bahkan jauh sebelum itu dalam era kolonisasi Inggris dan fasisme Jepang. Militer sejak awal telah berada “*at the heart of power*” dan hingga kini tetap terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan yang melibatkan masa depan Burma/Myanmar.<sup>28</sup>

Menurut Jon A. Wiant dan David I. Steinberg,

... Historically, in Burma like other Southeast Asian states influenced by the classical Indian Ashokan model of kingship, the centre defined the kingdom and political authority was the function of the centre. Power radiated from the centre and its reach, in turn, defined the periphery, a fluid concept dependent on the vicissitudes of the centre rather than conditions on the periphery.

Although British colonialism destroyed the institutions of the classical states that were the manifestations of this ideational structure (the *Sangha*, or Buddhist monkhood, fared somewhat better), the valued have remained as an ideological contribution to present conceptions of political authority and its practice. Briefly, this contribution included

28 Jon A. Wiant and David I. Steinberg, “Burma: The Military and National Development”, dalam J. Soedjati Djiwandono dan Yong Mun Cheong, *Soldiers and Stability in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS, 1988. Hal 294-295

the ideas that the state was to create the circumstances in which individuals could pursue their own salvation – that is, relief from endless lives suffering.<sup>29</sup>

Dengan kata lain, politik kontemporer Burma/Myanmar tidak terlepas dari ide tradisional negara seperti yang dijabarkan di atas dimana gagasan power dan tanggungjawab otoritas politik bertahan sebagai sub-struktur laten. Orientasi kosmologi implisitnya misalnya dapat ditemukan dalam formulasi ideologi Burma seperti Sosialisme Burma.

Dalam kerangka nilai politik fundamental ini, secara historis Wiant juga mengajukan dua model otoritas politik yang saling bertentangan, yaitu "Scholar – King" dan "Military-Administrator King". Seperti dijelaskan oleh Wiant,

...Although the fundamental values informed the principles of kingship, their relative centrality varied between the two models. The former is associated with the glorification of Buddhism and the use of the state for merit-building activity, typically reflected in the efflorescence of art and architecture. Manifest ideological appeals are to the idea of kings as the Bodhisattva, or the emerging or embryo Buddha. The latter model draws its inspiration from themes of conquest, triumph, and unity. The merit derives from the heroic deed and action rather than artful construction. The ruler is the *chakravatin* (World Conqueror) more than Bodhisattva. The great dynastical founders of Burma – Anawrahta, Bayinnaung, and Alaungpaya – are placed in that tradition.<sup>30</sup>

29 Ibid. hal 296

30 Ibid hal 297

Burma di bawah pemerintahan U Nu dan Ne Win dianggap mewakili dua model otoritas politik tersebut di atas.

*Kedua*, Sumber legitimasi keberadaan *Tatmadaw* didasarkan pada ideologi *Nasionalisme* dan *Persatuan Nasional* (National Unity). Persatuan Nasional menjadi fokus utama dan alasan keberadaan atau eksistensi *Tatmadaw* yang dengan demikian antara lain "... *membantu suasana dimana kebebasan personal (samsara) dapat dicapai*.." <sup>31</sup>. Persatuan nasional menjadi obsesi militer sekaligus tanda seberapa "powerful" penguasa sebagai "the Great Power of the Unifier". Pengalaman eksistensial tindakan militer dalam "kolaborasi militan" antara *Tatmadaw*, petani, pekerja dan minoritas melawan fasis Jepang, perjuangan kemerdekaan Burma (1947), berbagai aksi militer terhadap usaha separatisme etnik dari Persatuan Burma sejak kemerdekaan hingga saat ini, kudeta (1962) juga dianggap sebagai usaha penyelamatan negara dari ancaman disintegrasi. Pada prinsipnya, ideologi persatuan harus dipertahankan.

Oleh karena itu, persatuan internal juga sangat penting bagi *Tatmadaw* sebagai suatu organisasi militer modern pertama di Burma. Fragmentasi militer berdasarkan garis etnik dicoba diatasi dengan subordinasi identifikasi etnik dalam struktur komando militer. Adanya praktek 'pembersihan' perwira militer yang mencoba mendukung tumbuhnya partai politik sipil dalam periode Pemerintahan Caretaker (1961-1962) dapat dilihat sebagai bagian dari usaha konsolidasi dan penyatuan *Tatmadaw*.

*Ketiga*, hal yang perlu dicatat adalah, reformasi yang dilakukan penguasa militer tentu tidak bisa dipisahkan dari "gerakan kelompok reformis militer" dalam tubuh *Tatmadaw*. Seberapa kuat dan dominannya kelompok reformis ini? Sejak dicanangkannya "Peta Jalan Demokrasi 2003" diperkirakan kelompok militer reformis telah mengambilalih

31 Ibid. Hal 297

agenda pemerintah Myanmar. Meskipun ada juga analisis yang menyebutkan Presiden Thein Sein adalah figur yang memang sengaja dipersiapkan untuk memberi kesempatan kepada pendahulunya, Jendral Than Shwe "lengser" dengan aman. Di lain pihak faktor ASEAN tidak dapat dikesampingkan dalam meyakinkan Myanmar akan "*the right direction*" reformasi dan peluang menjadi Ketua ASEAN 2014.

Dalam pidato pelantikannya pada Maret 2011 Presiden Thein Sein secara gamblang menyatakan akan memulai agenda reformasi untuk masa depan Myanmar dengan mengesampingkan berbagai perbedaan.<sup>32</sup> Dalam pidatonya 19 Agustus 2011, Presiden Thein Sein juga dengan jelas menyatakan bahwa tujuan pemerintahannya adalah membangun bangsa modern dan demokratis. Agenda reformasi Presiden termasuk mengembangkan ekonomi, reformasi politik nasional dan perbaikan hak asasi manusia. Untuk negara yang selama 50 tahun diperintah secara otoriter dan tertutup, ini adalah tanda-tanda luar biasa, meski diakui banyak langkah fundamental yang harus dilakukan, termasuk tantangan dari "*the hardliners*" (kaum garis keras), seberapa jauh kapasitas teknis kelembagaan dapat mendukung langkah reformasi selain masalah-masalah lama (konflik etnik, kebebasan sipil dan media, dan lain-lain) yang harus diselesaikan.<sup>33</sup>

Di lain pihak perlu diketahui bahwa kabinet Than Sein sebagian besar masih didukung oleh anggota militer rejim sebelumnya. Kabinet merupakan kombinasi antara militer dan anggota USDP yang notabene adalah partai pemerintahan militer. Seberapa jauh sebenarnya kekuatan golongan reformis dalam tubuh kabinet dan pemerintahan Thein Sein? Susunan dan komposisi kabinet Thein Sein di bawah ini antara lain dapat menjadi indikasi seberapa besar reformasi akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

32 <http://www.scribd.com/doc/66370056/ICG-Myanmar-Major-Reform-Underway>

33 "Reform in Myanmar: One Year On" dalam Asia Briefing No 136. Jakarta/Brussels, 11 April 2012. International Crisis Group. Hal 10-12.

**Kabinet dan Pemerintahan Myanmar Maret 2011** <sup>34</sup>

Kementerian	Nama Menteri	Partai/Gol	Catatan
Kementerian Dalam Negeri	Ko Ko	Militer	Mantan Ketua Biro Operasi Khusus-3 SPDC
Kementerian Pertahanan	Hla Min	Militer	Mantan Komandan Komando bagian Selatan SPDC
Kementerian Pengembangan Industri	Thein Htay	Militer	Mantan Wakil Menteri Pertahanan SPDC, Wakil Ketua Artileri, dan Ketua Artileri Militer
Kementerian Luar Negeri	Wunna Maung Lwin	Militer	Mantan Duta Besar PBB (2007-2011)
Kementerian Informasi dan Kementerian Budaya	Kyaw Hsan	Militer	Mantan Menteri Informasi SPDC dan Brigadir Jenderal
Kementerian Pertanian dan Imigrasi	Myint Hlaing	USDP	Mantan Komandan Komando Timur Laut SPDC dan Kepala Staf Angkatan Udara
Kementerian Perdagangan	Wunnakyawhtin Win Myint	USDP	Mantan Presiden Kamar Dagang dan Industri Myanmar
Kementerian Pembangunan/ Konstruksi	Kim Maung Myint	USDP	Mantan Menteri Sumber daya Listrik – 2 SPDC, Menteri Konstruksi dan Mayor Jenderal
Kementerian Hotel dan Turisme Kementerian Olah Raga	Tint Hsan	USDP	

<sup>34</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet\\_of\\_Burma](http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_Burma).



Kementerian Komunikasi, Pos dan Telegraf Ministry of Communications, Post and Telegraphs	Thein Tun	USDP	Mantan Wakil Menteri Komunikasi, Pos dan Telegraf SPDC dan Mayor Jenderal
Kementerian Keuangan dan Pendapatan	Hla Tun	USDP	Mantan Menteri Keuangan dan Pendapatan SPDC dan Mayor Jenderal
Kementrian Pertambangan	Thein Htaik	USDP	Mantan Letnan Jenderal
Kementerian Transportasi	Nyan Tun Aung	USDP	Mantan Wakil Menteri transportasi SPDC
Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Perencanaan Nasional Kementerian Peternakan dan Perikanan	Tin Naing Thein	USDP	Mantan Menteri Peternakan dan Perikanan SPDC dan Brigadir Jenderal
Kementerian Kehutanan	Win Tun	Military	Mantan Direktur Kementerian Kehutanan SPDC
Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Kembali	Aung Kyi	USDP	Mantan Menteri Tenaga Kerja SPDC

Kementerian Koperasi	Ohn Myint	USDP	Mantan Biro Operasi Khusus-6 SPDC, Komandan Komando Wilayah Utara dan Letnan Jenderal
Kementerian Industri	Soe Thein	USDP	Mantan Kementerian Industri-2 SPDC dan Letnan Jenderal
Kementerian Energi	Than Htay	USDP	Mantan Wakil Menteri Energi SPDC
Kementerian Transportasi Kereta Api	Aung Min	USDP	Mantan Menteri Transportasi KA SPDC
Kementerian Pendidikan	Mya Aye		Mantan Rektor Universitas Kedokteran, Mandalay
Kementerian Agama	Myint Maung	USDP	Mantan Menteri Agama SPDC
Kementerian Imigrasi dan Kependudukan	Khin Yi	Military	Mantan Brigadir Jenderal SPDC, Kepala Kepolisian Nasional, Wakil Menteri Dalam Negeri
Kementerian Sumber daya Listrik-1	Zaw Min	USDP	Mantan Menteri Tenaga Listrik-2 SPDC dan Kolonel
Kementerian Sumber daya Listrik - 2	Khin Maung Soe		Mantan Kepala Dewan Suplai Listrik Kota Yangon
Kementerian Ilmu dan Teknologi	Aye Myint	USDP	Mantan Menteri Olah Raga SPDC, Wakil Menteri Pertahanan dan Mayor Jendral

Kementerian Kantor Kepresidenan	Soe Maung	USDP	Mantan Letnan Jenderal, Ketua Jaksa Agung
	Thein Nyunt	USDP	Militer, Hakim Militer Mantan Menteri Pengembangan Daerah
	Kyaw Swa Khaing	USDP	Perbatasan SPDC, Masalah Pembangunan dan Gubernur Naypyidaw (2006-2011) Wakil Menteri Industri-2 SPDC dan Jenderal
Kementerian Kesehatan	Pe Thet Khin		Mantan kepala Profesor di Universitas Kedokteran 1, Yangon

Akan tetapi, perlu dicatat pada 4 September 2012 *Pyidaungsu Huttlaw* menerima permintaan perombakan kabinet dimana jumlah anggota meningkat menjadi 36 orang termasuk 6 Kementerian yang ditempatkan di kantor presiden. Presiden menerima pengunduran diri *Zaw Min*, Menteri Sumber daya Listrik 1 dan *Khin Maung Myint*, Menteri Konstruksi. Selain itu, terjadi pengunduran diri dari *Lun Maung*, Auditor Jenderal. *Thein Hteik*, Menteri Pertambangan ditunjuk untuk menggantikan LetJen *Wai Lwin* dari Komandan Angkatan Darat yang ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan menggantikan LetJen *Hla Min* yang akan pensiun dari militer. Selama reshuffle, 9 menteri dialih tugaskan, sebanyak 4 menteri ditempatkan di Kantor Presiden. Sementara satu orang *Aung Kyi* ditunjuk sebagai Menteri Informasi menggantikan *Kyaw Hsan* yang dipindah ke Kementerian Koperasi. Menteri Kelistrikan 1 dan 2 dijadikan satu menjadi Menteri Sumber Daya Listrik, sementara Kementerian Pengembangan Industri dihapuskan.

Presiden Thein Sein memang melaksanakan perombakan kabinet demi memuaskan tuntutan reformasi. Namun demikian, jika dicermati jabatan-jabatan strategis seperti kementerian Pertahanan, Dalam Negeri,

Transportasi, Perbatasan, Imigrasi, Pertanian, Koperasi tetap dipegang oleh kelompok militer dan USDP serta praktek pergantian kabinet yang lebih pada pergantian personil antar kementerian atau pengangkatan orang kedua (wakil) menjadi orang pertama (menteri).

Ada pun susunan kabinet yang baru adalah sebagai berikut<sup>35</sup>:

**Kabinet Myanmar paska Peromabakan (Reshuffle) September 2012**

Kementerian	Pejabat	Posisi sebelumnya
Petanian dan Irigasi	U Myint Hlaing	Mantan Komandan Pertahanan Udara (Lt-Jen)
Masalah Perbatasan	LtJen Thein Htay	Wakil Menteri Pertahanan
Perdagangan	U Win Myint	Presiden, Kamar Dagang
Komunikasi, Pos dan Telegraf	U Thein Tun	Wakil Menteri (kementerian yang sama)
Konstruksi	U Kyaw Lwin	Wakil Menteri Konstruksi
Koperasi	U Kyaw Hsan	Wakil Menteri Informasi
Kebudayaan	U Aye Myint Kyu	Wakil Menteri Olah Raga
Pertahanan	Letjen Wai Lwin	Jenderal Intendan
Pendidikan	Dr. Mya Aye	Rektor Univ Mandalay
Listrik	U Khin Maung Soe	Ketua, Dewan Suplai Listrik Yangon
Energi	U Than Htay	Wakil Menteri Energi
Kuangan dan Pendapatan	U Win Shein	Wakil Menteri (kementerian yang sama)
Luar Negeri	U Wunna Maung Lwin	Duta Besar/PR di Jeneva
Kehutanan	U Win Tun	Direktur Pelaksana, Perusahaan kayu Myanmar

35 Myanmar: Storm Clouds on the Hirozon dalam dalam Asia Briefing No 238. Jakarta/Brussels, 12 Nopember 2012. International Crisis Group. Hal 21

Kesehatan	Dr Pe Thet Khin	Rektor, Universitas Yangon Kedokteran 1
Dalam Negeri	Letjen Ko Ko	Kepala, Biro Operasi Khusus 3
Hotel dan Turisme	U Htay Aung	Wakil Menteri (Kementerian yang sama)
Imigrasi dan Kependudukan	U Khin Yi	Kepala Polisi
Industri	U Aye Myint	Ilmu dan Teknologi
Informasi	U Aung Kyi	Menteri Tenaga Kerja/ Kesejahteraan Sosial
Tenaga Kerja	U Maung Myint	Wakil Menteri LN
Peternakan dan Perikanan	U Ohn Myint	Menteri Perdagangan
Pertambangan	Dr Myint Aung	Anggota Persatuan Badan Pelayanan Sipil
Perencanaan Nasional dan Pembangunan Ekonomi	Dr Kan Zaw	Wakil Menteri (Kementerian yang sama)
Transportasi KA	Mayjen Zeyar Aung	Komandan Utara
Agama	Thura U Myint Maung	sama
Ilmu dan Teknologi	Dr Ko Ko Oo	Wakil Menteri (Kementerian yang sama)
Kesejahteraan Sosial, Pemukiman	Dr Daw Myat Myat Ohn Khin	Wakil Menteri Kesehatan
Olah Raga	U Tint Hsan	Ketua, Perusahaan Konstruksi ACE
Transportasi	U Nyan Tun Aung	Wakil Menteri (Kementerian yang sama)

Kantor Presiden	U Thein Nyunt U Soe Maung U Soe Thein U Aung Min U Tin Naing Thein U Hla Tun	Menteri Daerah Perbatasan Ketua Kejaksaan Agung Militer Menteri Perindustrian Menteri Transportasi KA Menteri Perencanaan Nasional dan Pembangunan Ekonomi Menteri Keuangan dan Pendapatan
Jaksa Agung	Dr. Tun Shin	Wakil Jaksa Agung

*Keempat*, kepentingan Ekonomi *Tatmadaw* merupakan faktor lain yang juga harus diperhitungkan. Berkuasanya militer dalam seluruh episode sejarah paska kemerdekaan Myanmar secara otomatis memberikan kesempatan bagi proses institusionalisasi bisnis kaum militer. Setidaknya ada dua lembaga bisnis legal yang tercatat yaitu *The Union of Myanmar Economic Holding Ltd* (UMEH) dan *the Myanmar Economic Corporation* (MEC). Dibentuk pada 1990 UMEH – dimiliki bersama oleh Direktorat Prokurmen Pertahanan dan mantan perwira militer – merupakan perusahaan nasional besar dengan modal tercatat 10 milyar Kyat.<sup>36</sup> Menurut laporan *International Crisis Group* (ICG), semua investasi asing utama dilakukan melalui UMEH yang hingga 1999 telah menandatangani 49 perjanjian investasi asing. Termasuk berbagai kepentingan komersial di bidang produksi dan pemasaran permata, perusahaan garmen, kayu, barang dan minuman dan perusahaan trading lain, supermarket, perbankan, hotel, turisme, transportasi, konstruksi, real estate, komputer, telekomunikasi, peralatan elektronik, industri baja dan semen. Sementara MEC di bawah Kementerian Pertahanan, merupakan perusahaan besar lain dengan otoritas melakukan kegiatan ekonomi di berbagai bidang seperti perdagangan, pertanian, hotel dan

36 *Myanmar: The Military Regime's View of the World*. ICG Asia Report N 28. 7 December 2001. <http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/burma-myanmar/028-myanmar-the-military-regimes-view-of-the-world.aspx>. Hal 8-9

turisme, eksplorasi, minyak dan gas yang menjadi monopoli pemerintah di era sosialisme.

Reformasi yang dilakukan militer dan pemerintah tentu mempertimbangkan tindakan "mengakomodasi" kepentingan ekonomi kelompok militer, dimana skenarionya adalah melalui berbagai institusi yang berkaitan dengan kekuasaan yang dipegang militer, kepentingan ekonomi kelompok militer akan dapat dipertahankan.

Kelima, Konstitusi Myanmar 2008 atau yang disebut *Constitution of the Republic of the Union of Myanmar* setebal 213 halaman menjadi basis pemerintahan reformasi Presiden Thien Sein. Konstitusi 2008 terdiri dari 15 bagian sesuai dengan prinsip dasar yang diformulasikan dalam Konvensi Nasional. Meskipun dalam prinsip dasar disebutkan "... *The Union consistent objectives are (d) flourishing of a genuine, disciplined multi-party democratic system..*" tetapi juga memasukkan tujuan lain yaitu (f) *enabling the Defense Services to be able to participate in the National political leadership role of the State.*"<sup>37</sup> Konstitusi 2008 juga menyatakan adanya tiga cabang kekuasaan negara yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif di bawah sistem parlementer. Legislatif membuat dan menyetujui undang-undang melalui Parlemen Nasional (*Pyidaungsu Hluttaw*) yang terdiri dari 2 majelis yaitu *The Union Assembly (Pyithu Hluttaw)* dengan maksimal 440 anggota dipilih oleh distrik dan *the National Assembly (Amyotha Hluttaw)* dengan maksimal 224 anggota dipilih per region. Akan tetapi perlu dicatat bahwa dalam kedua majelis tersebut seperempat kursi (25%) ditujukan bagi Angkatan Bersenjata Burma.

Dalam Bab V Konstitusi 2008 juga disebutkan di bawah cabang Eksekutif dibentuk *the National Defence and Security Council (NDSC)* dipimpin oleh Presiden dan terdiri dari (a) *President* (b) *Vice President*

<sup>37</sup> Lih Chapter I Basic Principles of the Union. Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008). Hal 7



(c) Vice President (d) Speaker of the Pyithuw Hluttaw (e) Speaker of the Amyotha Hluttaw (f) Commander in Chief of the Defence Services (g) Deputy Commander in Chief of the Defence Services, (h) Minister for Defence, (i) Minister for Foreign Affairs, (j) Minister for Home Affairs, (k) Minister for Border Affairs. Keempat menteri ini dipersyaratkan seorang pejabat militer yang aktif.<sup>38</sup> Presiden juga mempunyai kekuasaan, setelah berkoordinasi dengan NDSC untuk memberlakukan kondisi darurat (*a state of emergency*) pada keadaan tertentu.

Konstitusi 2008 juga mengatur berbagai ketentuan terhadap partai politik dan memberi kekuasaan veto bagi militer dalam hal amandemen konstitusi. Susunan Konstitusi 2008, sangat jelas bahwa jejak-jejak dominasi militer masih tampak sebagai cara pemerintahan militer mempertahankan kekuasaannya.

## Penutup

Berbagai komitmen dan realisasi terhadap reformasi dan demokratisasi di Myanmar oleh Pemerintahan Thein Sein sudah sangat jelas dalam periode satu dua tahun terakhir ini dan memunculkan optimisme dan antusiasme masyarakat nasional dan internasional. Akan tetapi “kekuatan-kekuatan” reformatif nampaknya harus tetap dalam “kendali” dan “skenario” pemerintah yang sebagian besar masih dipegang oleh personil militer dengan ideologi dan kepentingannya. Tidak mudah melihat seberapa besar peluang realisasi demokratisasi secara penuh hanya dalam satu dua tahun berjalan, mengingat militer masih mempertahankan posisinya baik secara *de jure* melalui Konstitusi 2008 maupun *de facto* dalam praktek pemerintahan.

Kepentingan politis dan ekonomis dengan legitimasi historis dan ideologis masih sangat kuat termanifestasi dalam perilaku pemerintah

<sup>38</sup> Ibid. Hal 86

(*government code*) yaitu bagaimana pemerintah mengorientasikan dirinya dalam kehidupan sosial politik dan ketika membuat keputusan dalam konteks nasional dan internasional di tengah masyarakat sipil Myanmar yang belum kokoh. Barangkali Myanmar tidak akan bisa meninggalkan "militer" dan militer pun tidak akan "*give in*" (menyerahkan) begitu saja terhadap kepemimpinan dan supremasi sipil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen

- The Constitution of the Union of Burma, Constituent Assembly of Burma  
Rangoon, Supdt, Govt. Printing and Stationery, Burma 1948.
- Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008)

### Buku

- Higginson, Michael S. Dobbs. 1996. *Asia Pacific Its Role in the New World Disorder*. Australia: Mandarin.
- Djiwandono, J. Soedjati and Yong Mun Cheong (eds). 1988. *Soldiers and Stability in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS.
- Finer. S. E. 1982. *Comparative Government*. England: Penguin Books.
- Lehman, F.K. (ed). 1981. *Military Rule in Burma Since 1962*. Singapore: Maruzen Asia.
- Lintner, Bertil. 1989. *Outrage Burma's Struggle for Democracy*. Hongkong: Review Publishing Company Limited.
- Maung, Mya. 1992. *Totalitarianism in Burma: Prospects for Economic Development*. New York: Paragon House.
- Steinberg, David. I. 1982. *Burma A Socialist Nation of Southeast Asia*. Colorado: Westview Press.
- Than, Mya. 2005. *Myanmar in ASEAN Regional Cooperation Experience*. Singapore: ISEAS
- Thein, Myat. 2001. *Economic Development of Myanmar*. Singapore: ISEAS

## Jurnal

Haacke, Jurgen. 2008. "ASEAN and Political Change in Myanmar: Toward a Regional Initiative?" dalam *Contemporary Southeast Asia*. ISEAS. Volume 30 Number 3 December 2008 hal 351-378.

## Report/Paper

Blum, Franziska, Friederike Trotier, Hans-Bernd Zollner (Eds). 2010. *In Their Own Voice "Democracy" as Perceived in Burma/Myanmar 1921-2010*. Working Paper No 14. Germany: Southeast Asian Studies Passau

ICG Asia Report. 2000. *Burma/Myanmar: How Strong is the Military Regime?*. No 11. Bangkok/Brussels

\_\_\_\_\_. 2001. *Myanmar: The Military Regime's View of the World*. Report No 28. Bangkok/Brussels

\_\_\_\_\_. 2012. *Reform in Myanmar: One Year On*. No 136. Jakarta/Brussels

Martin, Michael F. 2010. *Burma's 2010 Elections: Implications of the New Constitution and Election Law*. CRS Report for Congress.

## Website

[http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder\\_published/publication\\_579/files/OUP\\_Ch06.pdf](http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/publication_579/files/OUP_Ch06.pdf)

<http://en.wikipedia.org/wiki/tatmadaw>

[http://heinonline.org/HOL/LandingPage?  
collection=journals&handle=hein.journals  
forwa13&div=27&id=&page=](http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journalsforwa13&div=27&id=&page=)

[http://en.wikipedia.org/wiki/888\\_Uprising](http://en.wikipedia.org/wiki/888_Uprising)

[Http://en.wikipedia.org/wiki/Burmese\\_general\\_election,\\_2010](Http://en.wikipedia.org/wiki/Burmese_general_election,_2010)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Burmese\\_constitutional\\_  
referendum,\\_2008](http://en.wikipedia.org/wiki/Burmese_constitutional_referendum,_2008)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Roadmap\\_to\\_democracy](http://en.wikipedia.org/wiki/Roadmap_to_democracy)

[http://www.scribd.com/doc/66370056/ICG-Myanmar-Major-Reform-  
Underway](http://www.scribd.com/doc/66370056/ICG-Myanmar-Major-Reform-Underway)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet\\_of\\_Burma](http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_Burma)

## **Film**

The Lady. Europacorp. 2012.



## BIOGRAFI PENULIS

**Ade Priangani** | [adepriangani@rocketmail.com](mailto:adepriangani@rocketmail.com)

Dosen Program Studi Ilmu Hub. Internasional, FISIP-UNPAS. Pada 2008-2011 menjadi mitra Kementerian Luar Negeri untuk mensosialisasikan ASEAN Charter dalam wujud Lomba Simulasi Sidang ASEAN antar SMA/SMK/MA se-Kota Bandung (2008), se- Provinsi Jawa Barat (2009), se-Provinsi DKI Jakarta (2009), se-Provinsi Banten (2011). (Dalam kegiatan ini, saya menjadi moderator dan Narasumber di beberapa kota). Mengajar Mata Kuliah Politik dan Pemerintahan di Asia Tenggara, Mengikuti Seminar Internasional “Menumbuhkembangkan Local Wisdom Sebagai Bagian dari Keunggulan Potensi Kultur Bangsa-Bangsa ASEAN” (Kemlu, Unpas, Disbudpar Jabar, Bandung, 26 April 2010), Meneliti Child Traffiking di Asia Tenggara : Suatu Analisis dari Perspektif Kejahatan Transnational (2009). Menjadi pembimbing dalam kegiatan Praktek Diplomasi ke Singapura dan Malaysia (2005) serta ke Brunai-Vietnam, Cambodia dan Thailand (2009). Selain itu, beliau juga menulis beberapa tulisan yang berkaitan dengan Asia Tenggara, diantaranya: Indonesia Menetapkan ASEAN Community 2015 (Polistaat Vol.9 No.1, Januari-Juni 2009); Kenapa Malu Belajar Dari Malaysia (Media Unpas, Edisi V, Sept-Okt 2009), Menulis Buku Terorisme sebagai Ancaman Global dan Keberadaannya di Asia Tenggara” (2009).



**Dwi Setyowati** | [uwie1010@gmail.com](mailto:uwie1010@gmail.com)

Setelah menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI pada tahun 2004, penulis menekuni dunia akademik dengan menjadi asisten dosen pada almamater. Tahun 2006-2007 berkesempatan melanjutkan pendidikan di IEP de Toulouse dengan beasiswa pemerintah Perancis. Saat ini tengah menempuh studi S2 Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM dengan konsentrasi kajian HAM dan Demokrasi. Minat penelitian terutama pada masalah hak asasi manusia, demokrasi, politik keamanan dan gerakan perempuan.

**Dyah.S.Pradnya.P, ST, MT** | [dyah\\_pradnya@yahoo.com](mailto:dyah_pradnya@yahoo.com)

Dosen tetap di Prodi Arsitektur, Universitas Sebelas Maret (UNS) sejak 1997 sampai sekarang. Sering melakukan penelitian mengenai kebudayaan daerah yang berkaitan dengan Arsitektur. Di samping itu, juga melakukan diseminasi hasil penelitian melalui Laporan Penelitian, Makalah, Jurnal, Blog dan Poster. Sedangkan dalam materi perkuliahan, beliau menerapkan hasil penelitian tersebut, dalam Pembimbingan Tugas Studio Perancangan Arsitektur, Filsafat Ilmu, Seminar dan Tugas Akhir. Beliau juga mengajarkan cara mengeksplorasi data dan menuangkan ide kreatifitas desain, berdasarkan berbagai pengalaman dan pemahaman mengenai fenomena lapangan.

**Ignatius Ismanto** | [ignatius.ismanto@uph.edu](mailto:ignatius.ismanto@uph.edu)

Penulis menyelesaikan program S-1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada pada 1983, dan menyelesaikan Program Magister Kebijakan Publik, masing-masing dari FISIP-UGM pada 1995, dan MA in Public Policy,

Universitas Murdoch, Perth, Australia Barat pada 1997. Kini menjadi pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan, Karawaci – Tangerang, Banten.

**Linggar Rama Dian Putra** | [linggar.rama.201@gmail.com](mailto:linggar.rama.201@gmail.com)

Penulis adalah lulusan Antropologi Universitas Gadjah Mada dan saat ini aktif sebagai salah satu staf peneliti di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara. Paper berjudul '*Konsumsi dan Gaya Hidup: Interseksi Kelas dan Urbanisme Kontemporer*' merupakan salah satu hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk melihat perkembangan terkini *landscape* kota-kota di Asia Tenggara dan perubahan sosial yang terjadi di era *post-authoritarian* di Asia Tenggara dan implikasinya terhadap studi-studi sosial di kawasan ini. Penulis secara khusus menaruh perhatian pada studi sosial perkotaan di Asia Tenggara yang menurutnya sejak pertumbuhan industri di kawasan ini, Asia Tenggara merupakan area yang mengalami percepatan urbanisasi. Isu-isu seperti *inequality*, kelas, resistensi, *everyday politics* dan gaya hidup adalah minat khusus penulis dalam melihat gejala-gejala yang terjadi di perkotaan Asia Tenggara.

**Moordiati** | [diati\\_gf@yahoo.com](mailto:diati_gf@yahoo.com)

Penulis menyelesaikan program S1 di Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra UGM, dan menyelesaikan program S2 di jurusan yang sama. Saat ini mengajar di Departemen Sejarah FIB Universitas Airlangga dalam mata kuliah Sejarah Asia Tenggara sejak 2002. Minat penelitian adalah bidang sejarah, gender, dan migrasi.

**Nuraeni** | nuraeni.suparman@gmail.com

Sarjana Ilmu Politik dari Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran Bandung (2002); Magister Humaniora dari Program Magister Ilmu Filsafat, Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta (2011); Dosen Tetap di Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNPAD (Sejak 2005); Dosen Luar Biasa di Pusat Kajian Humaniora Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2012).

**Padma Indranila** | padmaindranila@yahoo.com

Sarjana Antropologi dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada (2005 - 2009). Mulai tahun 2010 bekerja sebagai asisten peneliti di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, UGM. Minat penelitian terutama pada isu tentang identitas, budaya, dan nasionalisme.

**Ratih Indraswari SIP, MA.** | indraswari.ratih@gmail.com

Lulusan Universitas Groningen dalam kajian Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional. Saat ini mengajar di Universitas Katolik Parahyangan dengan focus Hubungan Internasional dan Hubungan Internasional di Asia Tenggara.

**Siti Zurinani** | zurie\_nani@yahoo.com

Sarjana dalam bidang Antropologi di Universitas Gadjah Mada (2005-2009); Studi Pascasarjana Antropologi (2010-2012). Mulai Juli 2011 menjadi staf pengajar pada program studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Banyak mendalami bidang kajian pedesaan, ekonomi, kesehatan lingkungan, transisi agraria, dan pertanian dataran tinggi. Beberapa hasil penelitian

yang dipublikasikan *Kebersihan Kampung dan Rumah Tangga di Kalangan Petani Jawa* (2009), *Karyawan dan Buruh Lepas: Sketsa Pekerja Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit Sei Dekan Afdeling Satu* (2010), *Budiaya Kopi di Hutan dan Dinamika Pelapisan Sosial Petani Jawa* (2012).

**Sudrajat, M. Pd.** | sudrajat73@gmail.com

Pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta diselesaikan pada tahun 1999. Pendidikan S2 dalam bidang pendidikan IPS diselesaikan tahun 2010. Sejak tahun 2006 menjadi dosen pada Jurusan Pendidikan Sejarah dengan mata kuliah Sejarah Asia Tenggara Kuno. Saat ini tinggal di Priyan RT 03 Potorono Banguntapan Bantul Yogyakarta.

**V.L. Sinta Herindrasti** | Herindrasti@yahoo.com

Meraih gelar Master of Arts dalam International Studies Asia Pacific Region, School of Politics University of Nottingham, UK pada 2000. Dosen tetap pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia sejak 2007. Pendiri dan pengurus IAS atau Institute of ASEAN Studies UKI, suatu lembaga kajian dan penelitian kawasan Asia Tenggara dan ASEAN serta Redaksi "Sociae Polites" Jurnal FISIPOL UKI.